



LAPORAN KINERJA (LKj)

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2023**

BENGKULU SELATAN EMAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Instansi Daerah ini disusun sebagai tanggungjawab Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2023. Lkj ini juga dibuat supaya dapat dijadikan pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Penyusunan Lkj Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ini dibuat berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

Penyusunan Lkj ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekeliruan ataupun kekurangan, untuk itu penulis sangat membutuhkan masukan dan saran yang bersifat konstruktif yang dijadikan pedoman serta acuan untuk perbaikan dimasa mendatang.

Semoga penyusunan Lkj ini dapat bermanfaat Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Manna, 2024

INSPEKTUR
DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN



HAMDAN, S.Sos
NIP. 197201011993031007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Setiap instansi diwajibkan untuk dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja di akhir tahun anggaran, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Tahun 2023 merupakan salah satu media bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 berdasarkan Renstra Tahun 2022-2026, dari sasaran tersebut disusun 3 (tiga) program 9 (sembilan) kegiatan yang di implementasikan menjadi 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Penetapan program/kegiatan selain mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan juga berdasarkan arah kebijakan umum APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada dasarnya sudah cukup baik, namun pencapaian target dari beberapa sasaran strategis masih ada yang belum dapat dicapai dengan maksimal. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga masih ada sasaran yang belum dapat diwujudkan dengan maksimal, yaitu :

1. Sarana dan prasarana penunjang kinerja yang belum begitu memadai terutama perangkat elektronik yang masih sangat terbatas;
2. Sumber daya manusia jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari jabatan fungsional Auditor dan PPUPD yang masih kurang dari segi jumlah maupun Auditor dan PPUPD yang mempunyai keterampilan khusus;

Meskipun terdapat kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai target sasaran strategis dengan maksimal, namun dengan semangat yang tinggi serta kerjasama yang solid sehingga kendala-kendala tersebut tidak begitu menjadi hambatan berat dalam mencapai tujuan.

Demikian ringkasan eksekutif ini sebagai bahan kelengkapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Kepada Bupati Bengkulu Selatan terkait kinerja Inspektorat pada tahun anggaran 2023.

Manna, 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan LKj.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan LKj	3
1.4 Gambaran Umum PD	3
A. SOTK.....	3
B. Isu Strategis PD.....	5
C. Keadaan Pegawai.....	6
D. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	9
E. Keuangan	11
1.5 Sistematika LKIP	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
2.1 Perencanaan Strategis	14
A. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	14
B. Tujuan dan Sasaran PD	14
C. Strategi arah Kebijakan.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja	17
2.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama PD	29
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	32
3.3 Realisasi Anggaran	37
3.4 Inovasi Perangkat Daerah	39
BAB IV.PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan	6
Tabel 1.3. Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan.....	7
Tabel 1.4. Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan	7
Tabel 1.5. Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	9
Tabel 1.6. Belanja Inspektorat Tahun 2023	11
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	16
Tabel 2.2. Arah dan Kebijakan Inspektorat Daerah	16
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Eselon II Inspektur	17
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Eselon III Sekretaris	18
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Eselon III Irban Khusus	19
Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Eselon III PAKD	20
Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Eselon III PPPD	20
Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Eselon III PRB.....	21
Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja Eselon IV Kasubag Umum, Evaluasi dan Pelaporan	22
Tabel 2.10. Rencana Belanja Inspektorat Daerah.....	23
Tabel 2.11. Realisasi Anggaran	24
Tabel 2.12. Alokasi Anggaran Persasaran Strategis	27
Tabel 3.1. Predikat Capaian Penilaian Kinerja.....	29
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	30
Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program dan Kegiatan	30
Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kinerja	31
Tabel 3.5. Perbandingan Realiasi Kinerja	31
Tabel 3.6. Analisis Capaian Sasaran Pertama	33
Tabel 3.8. Analisis Capaian Sasaran Kedua	34
Tabel 3.10. Analisis Capaian Sasaran Ketiga	35
Tabel 3.12. Pagu Anggaran Inspektorat 2023.....	37

Tabel 3.13. Pencapaian Pagu Realisasi Berdasarkan Misi	38
Tabel 3.14 Pencapaian Pagu Realisasi Berdasarkan Sasaran	
Program dan Kegiatan	38
Tabel 3.15. Inovasi Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.....	5
--	---



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari instruksi Presiden (Inpres) No 7.Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mengamanatkan setiap instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sungguh-sungguh dan mempertanggungjawabkan atas setiap pelaksanaan tugas atau penggunaan anggaran. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah, maka dibuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) sebagai alat ukur dalam melakukan evaluasi. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah (Lkj) merupakan produk akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pemerintahan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi yang memuat informasi tentang realisasi kinerja tahun ini, capaian target, perbandingan kinerja dengan tahun lalu, analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan, analisis efesiensi penggunaan sumber daya dan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Laporan Kinerja Pemerintah (Lkj) bisa mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan pihak-pihak terkait atau yang berhubungan dengan instansi tersebut. Lkj berperan sebagai kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance* dan bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dan harusnya tercapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (Lkj). Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan No 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan bahwa Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Sebagai wujud akuntabilitas dari Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lkj) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023. Lkj ini dibuat berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam bentuk capaian program dan kegiatan yang termasuk dalam Renstra 2022-2026 dan Renja 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan LKj

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 adalah Wujud Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Anggaran serta Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai Visi dan Misi Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2023. Sedangkan tujuan penyusunan Lkj yaitu :

- a. Sebagai salah satu sarana untuk mengukur dan meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 sehingga akan mempermudah dalam mengambil kebijakan-kebijakan atau membuat keputusan
- b. Menetapkan mekanisme pelaksanaan tugas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang diwajibkan untuk menetapkan tujuan operasional, menyajikan dan melaporkan hasil kinerja yang nyata dari pelaksanaan aktivitas-aktivitas pemeriksaan maupun

pengawasan sehingga dapat diukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar kedisiplinan dan memberikan *reward* bagi pegawai yang berprestasi.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Lkj

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dibuat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

1.4. Gambaran Umum PD

A. SOTK

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Unsur Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

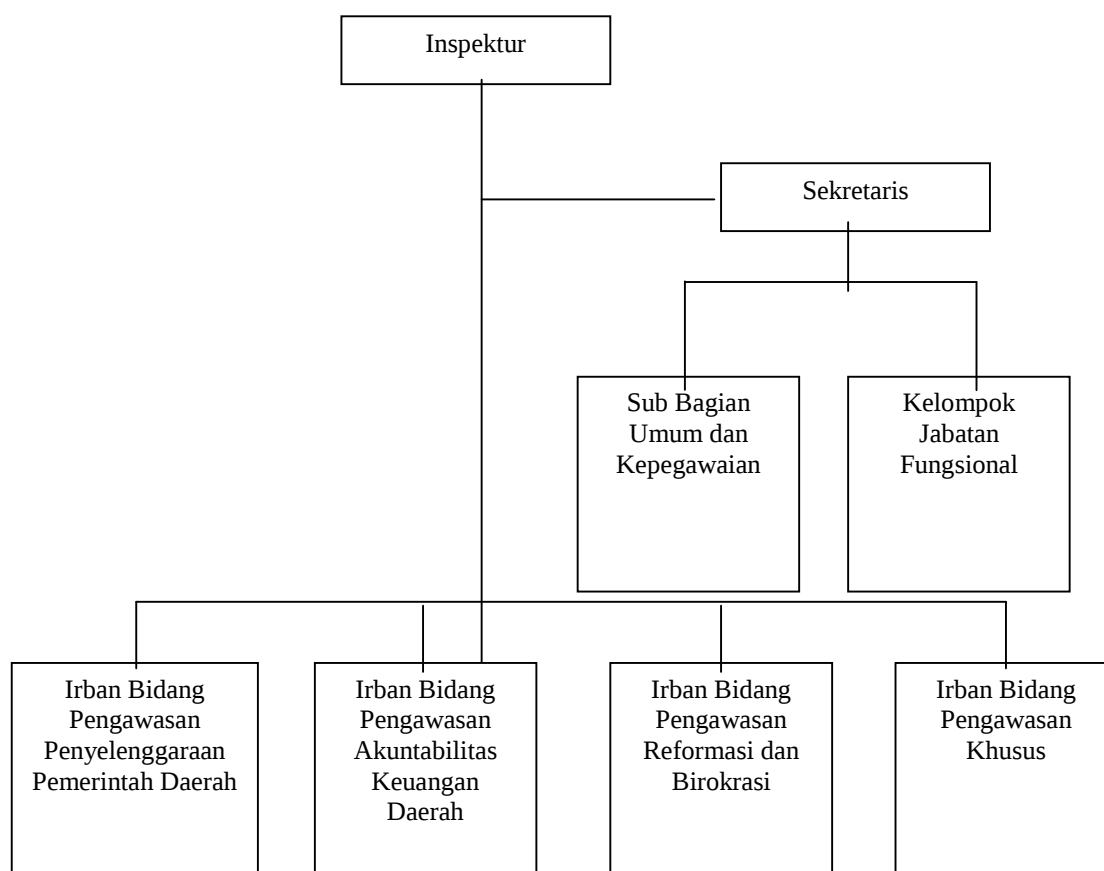
Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut, organisasi Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah. Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaiberikut:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian ;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas KeuanganDaerah;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan



B. ISU STRATEGIS PD

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kabupaten Bengkulu selatan terdapat beberapa isu strategis :

1. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan.
2. Peningkatan Level maturitas SPIP.
3. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

4. Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.
5. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
6. Peningkatan Level Kapabilitas APIP.
7. Peningkatan pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Bagaimana upaya dan komitmen Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan KKN.

C. KEADAAN PEGAWAI

Dalam melaksanakan segala aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sehari-hari, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan didukung oleh Sumber Daya Manusia dan fasilitas-fasilitas. Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berjumlah 48 orang PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	9	
2	Golongan III	35	
3	Golongan II	2	
	Jumla	48	

Tabel 1.2
Sumber Daya manusia Berdasarkan Jabatan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	5	
3	Eselon IV	2	
4	Fungsional	22	
5	Fungsional	15	
6	Fungsional	3	
	Jumla	48	

Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	SD/SMP		
2	SMA		
3	D3	3	
4	S1	35	
5	S2	10	
6	S3	0	
	Jumla	48	

Tabel 1.4
Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan

NO	NAMA	JABATAN	ESEL
1	Hamdan, S.Sos	Inspekt	I
2	Lesmi Despitasaki,S.Sos	Sekretar	III/a
3	Pedi Maryanto,S.Pt. M.S.si	Irban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	III/a
4	Gunawan Sulianto,S.Sos	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daera	III/a
5	Zofyan Harloki,S.Pt	Irban Bidang Pengawasan Khusus	III/a
6	Assilahwati, S.E. M.Si	Irban Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi	III/a
7	Rahma Yuni Midarti, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	IV/a
	Riana Desti, SE	Kasubbag Umum, Kepegawaian,	IV/a
9	Nurmansyah	PPUPD	
10	Andi Miza, ST	Audito	
11	Meiri, SE	Audito	
12	Evi Marlana, S.Kom	Audito	
13	Suhaiba, SKM., MM	Audito	
14	Sosti Emelia., SE	Audito	
15	Neti Herawati, SE	Audito	
16	Ruhidin, A.Md	Audito	
17	Wahyuni Lestari, S.Kom	PPUPD	
18	Drs. Ismawan, M.AP	Audito	
19	Mahmudah, SH., M.Si	PPUPD	
20	Joyo Reman, SH	PPUPD	
21	Eni Fitriati, S.IP., MM	PPUPD	
22	Arlis Mililiyanti, SE	Audito	

23	Pitri Puspita Sari, SE.,	Auditor	
24	Sry Marleni, SE	Auditor	
25	Herman Efendi, S.Sos	PPUPD	
26	Tepi Supriadi, SE	PPUPD	
27	Ema Zuliani, S.Sos	Auditor	
28	Emma Ratna Wardani, SE., MM	Auditor	
29	Yen Suhadi, ST	PPUPD	
30	Nuraisyah, SE	Auditor	
31	Indra Tri Prasetyo, SE., MM	Auditor	
32	Tina Lestari, SE	Auditor	
33	Lesfi Juisma, S.Pd	Auditor	
34	Farizal Budiman, ST	PPUPD	
35	Anita Carolina, SE., MM	Auditor	
36	Betmi Herawati, SKM., MM	Auditor	
37	Yogi Rahmatin Hasanah, S.IP	PPUPD	
38	Sri Marini Noviyanti, A.Md	Staf	
39	Eva Susanti, SE	Staf	
40	Maman Merianto, S.IP	Staf	
41	Achmad Ramadhani, SM	Auditor	
42	Ayu Pitaloka, S.Ak	Auditor	
43	Rahma Adafi'ah, SE	Auditor	
44	Puji Purnama Sari, S.Pi	Staf	
45	Ari Irawan, A.Md	Staf	
46	Kosnelawati, SE	PPUPD	
47	Lendra Hayati, SE	PPUPD	
48	Syahril Kurniawan, SE	PPUPD	

D. KEADAAN SARANA & PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, maka diberikan fasilitas atau sarana dan prasarana sebagai penunjang. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	Nama Barang	Jumlah/Luas	Tahun Pembelian	Kondisi			Ket
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah	L=2100 M2	1991				
2	Gedung Kantor	L= 271 M2, L=70,5M2	1993, 2014				
3	Avanza	1 Unit	2000				
4	Maven	1 Unit					Pinjam Pakai
5	Sepeda Motor	8 Unit	2000,2014				
6	Electric Generating	1 Unit	2006				
7	Mesin Ketik Manual	1 Unit	2014			√	Rusak
8	Lemari Besi	1 Unit	2019				
9	lemari Kaca	1 Unit	2008				
10	Lemari Kayu	13 Unit	2005,2016				
11	Rak Kayu	1 Unit	2005				
12	Meja Kayu/Rotan	60 Unit	2005,2016			√	1 Rusak
13	Meja Tulis	1 Unit	2009				
14	Meja Biro	4 Unit	2005, 2008				
15	Meja Kerja	5 Unit	2011, 2013				
16	Meja Tamu	1 Unit	2008			√	Rusak
17	Kursi Kerja Pejabat	6 Unit	2013, 2014			√	1 Rusak
18	Kursi Putar	14 Unit	2008, 2015, 2019				
19	Kursi Tamu	3 Unit	2018				

20	Kursi Plastik	61 Unit	2008, 2018				
21	Kursi Kayu	2 Unit	2008			√	2 Rusak
22	Kursi Besi	20 Unit	2020				3 Rusak
23	Lemari Es	1 Unit	2009				
24	AC	16 Unit	2008, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020			√	2 Rusak
25	Kipas Angin	5 Unit	2015				3 rusak
26	Televisi	3 Unit	2008,2009, 2019				2 Rusak
27	Loudspeaker	2 Unit	2019, 2022			√	1 Rusak
28	Wireless Amplifier	1 Unit	2013				
29	Wireless	1 Unit	2007				
30	PC Unit	9 Unit	2018,202			√	1 Rusak
31	Laptop	21 Unit	2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019,2022				1 Rusak
32	Notebook	6 Unit	2019, 2020				
33	Printer	25 Unit	2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022				12 Rusak
34	Kamera Digital	3 Unit	2019				
35	Proyektor	1 Unit	2016				
36	Scanner	1 Unit	2020				
37	Facsimile	1 Unit	2008				1 Rusak

Ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga masih ada sasaran yang belum dapat diwujudkan dengan maksimal, yaitu :

1. Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja yang belum begitu memadai terutama perangkat elektronik yang masih sangat terbatas;
2. Sumber Daya Manusia Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD yang masih kurang dari segi jumlah maupun Auditor dan PPUPD yang mempunyai keterampilan khusus;

Meskipun terdapat kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai target sasaran strategis dengan maksimal, namun dengan semangat yang tinggi serta kerjasama yang solid sehingga kendala-kendala tersebut tidak begitu menjadi hambatan berat dalam mencapai tujuan.

E. KEUANGAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2023 mempunyai Anggaran sebesar 7.073.772.720,- setelah Perubahan Anggaran menjadi Rp.7.693.860.640 .Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6
Belanja Inspektorat Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Ket
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.177.802.520	6.213.170.600	
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.260.572.720	5.047.363.820	
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121.445.000	116,485.000	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.285.700	621.992.040	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	158.093..900	153.431.900	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.559.200	105.953.440	
1.6	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	125.846.000	149.196.400	
1.7	Perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18.748.000	
2	Penyelenggaraan Pengawasan	650.038.000	915.461.000	
2.1	Penyelenggaraan pengawasan internal	544.606.000	733.529.000	

2.1	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	105.432.000	181.932.000	
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	272.833.000	495.932.200	
3.1	Pendampingan dan asistensi	245.932.200	495.932.200	
	Jumlah Anggaran	7.073.772.720	7.624.563.800	

1.4. SISTEMATIKA LKj

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) menggambarkan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama Tahun 2023. Sistematika Penyusunan Lkj adalah sebagai berikut:

BAB. I Pendahuluan.

Menggambarkan secara ringkas mengenai Latar Belakang, Tujuan Penyusunan LKj, dan Gambaran Umum PD yaitu SOTK, ISU Strategis, Keadan Pegawai, Keadaan Sarana & Prasarana, Keuangan serta Sistematika LKIP.

BAB.II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Menjelaskan tentang Perencanaan Strategis, Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran PD, Strategi dan Arah Kebijakan, Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran PD, Target Belanja, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.

BAB.III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan Capaian Indikator Kinerja Utama PD, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Inovasi Perangkat Daerah (dijelaskan inovasi yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja PD).

BAB. IV. PENUTUP

Berisikan uraian simpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

A. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah yaitu “Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, Inovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing) ” yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang mempunyai 4 (empat) misi yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.
2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing;.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.

Untuk mencapai Visi dari Kepala Daerah tersebut maka Inspektorat sebagai organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka Inspektorat mengampu misi yang keempat yang terkait dengan tugas dan fungsi tersebut yaitu “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi.

B. Tujuan dan Sasaran PD

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah upaya pencapaian arah strategi menuju perbaikan kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi.

a. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan mengenai hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi

dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan maka tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatkan kepatuhan tata kelola keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP);
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan internal

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut :

1. Asistensi Pendampingan AKIP OPD
2. Meningkatkan Kualitas terhadap tata kelola keuangan Perangkat Daerah sesuai S.A.P
3. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan dan SDM APIP

Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Indikator Kinerja beserta target yang akan dicapai dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator or Program/	Target Kinerja pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	B	BB	BB	BB	BB
Meningkatkan Kepatuhan Tata Kelola Keuangan sesuai S.A.P	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah Sesuai	Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan SDM APIP	Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Adapun Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 2.2.
Arah dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Visi	Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)		
Misi ke-4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.		
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Asistensi Pendampingan AKIP OPD	1. Melakukan pendampingan dan asistensi kepada OPD 2. Melaksanakan Reviu, Monev Pemantauan pada OPD 3. Mengoptimalkan penerapan kendali Audit.	1. Mengirimkan APIP untuk mengikuti diklat mandatori dan regulasi pembinaan dan pengawasan 2. Melakukan penerapan reviu, koordinasi monitoring dan evaluasi pengawasan 3. Peningkatan penerapan SPIP 4. Mengawal pencapaian opini WTP 5. Mengawal peningkatan implementasi sapip,

Meningkatkan Kepatuhan Tata Kelola Keuangan sesuai S.A.P	Meningkatkan Kualitas terhadap tata kelola keuangan Perangkat Daerah sesuai S.A.P	1.Melakukan Pengawasan Laporan Keuangan dan Aset Daerah 2.Melakukan Pendampingan dan Asistensi Kepada OPD terhadap penyelesaian TLHP APIP dan BPK	6. Mendorong kepatuhan OPD terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP,BPK. 7. Mewujudkan SDM APIP yang Profesional ,berkemotensi dan keahlian 8. Meningkatkan kualitas SDM APIP dengan melalui pengembangan SDM 9. Mengawal terbentuknya unit kerja WBK/WBBM
Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal	Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan dan SDM APIP	1.Meningkatkan kapabilitas kompetensi dan keahlian APIP yang berintegritas, dan profesional 2.Melakukan pendampingan dan asistensi kepada PD dalam kelengkapan unsur SPIP.	

2.2 Perjanjian Kinerja (PK)

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh organisasi pemerintahan. Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, satuan dan target kinerja. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu selatan telah membuat Perjanjian Kinerja (PK) untuk Tahun 2023 yang ditanda tangani oleh Inspektur Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Bupati Bengkulu Selatan yang berisi sasaran, indikator kinerja dan target kinerja selama 1 (satu) tahun. Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja (PK), diukur keberhasilan dan kegagalannya dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir priode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon II Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	B
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Opini Laporan Keuangan oleh BPK	Opini	WTP

3	Meningkatkan kualitas sistem pengawasan	Level maturitas SPIP dan kapabilitas	Level	3
---	---	--------------------------------------	-------	---

Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 7.073.772.720,- setelah Perubahan Anggaran menjadi Rp. 7.693.563.800,-

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon III Sekretaris Tahun 2023

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan penganggaran	Nilai AKIP OPD	BB	Nilai
2	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	Indek Kepuasan ASN/APIP	80	Angka
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Administrasi keuangan dan barang milik daerah	LHP APIP dan BPK	100	%
		Tingkat kepuasan APIP terhadap Saprass	100	%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Administrasi keuangan Perangkat daerah	Rp 5.558.575.530,-
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp 167.214.000,-
3	Administrasi Umum perangkat daerah	Rp 418.955.280,-
4	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 175.200.610,-
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 77.395.050
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 207.032.840,-

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon III Irban Khusus Tahun 2023

NO	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Kualitas Akuntabilitas Dokumen	Nilai AKIP	BB	Nilai
2	Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil	90	%
3	Pelaksanaan Koordinasi, Monev serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Indek Maturitas SPIP dan Nilai MCP	3	Level
4	Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan	Persentase Jumlah pengaduan dan temuan yang	90	%

Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp. 83.427.780
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp. 21.603.770
3	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 134.968.450
4	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp. 571.323.310

Tabel 2.6.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon III Irban PAKD Tahun 2023

NO	Sasaran Program dan	Indikator kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Kualitas Akuntabilitas Dokumen Kinerja	Nilai AKIP	B	Nilai
	Pelaksanaan Monitoring Kinerja /pengawasan Internal Perangkat Daerah	LHE SAKIP OPD	100	%
	Pelaksanaan Monitoring Kinerja /pengawasan Internal Perangkat Daerah	LHR SAKIP OPD	100	%

Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 154.650.040
		Reviu Laporan Kinerja	Rp. 121.712.000
	JUMLAH		Rp. 276.362.040

Tabel 2.7.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon III Irban PPPD Tahun 2023

NO	Sasaran Program dan	Indikator kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Kualitas Akuntabilitas Dokumen Kinerja	Nilai AKIP	BB	Nilai
	Pelaksanaan Monitoring Kinerja /pengawasan Internal Perangkat daerah	LHE SAKIP OPD	100	%

Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.	Pengawasan Desa	Rp. 202.188.780

Tabel 2.8.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon III Irban PRB Tahun 2023

NO	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Penegakan			
	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Evaluasi Ex-Ante	1	Kali
		Jumlah Perangkat Monitoring dan Evaluasi On Going	4	Kali
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIP minimal 80	30	OPD
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100	Persen
	Meningkatnya efektifitas pengendalian internal Perangkat Daerah	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI)	3	Level
	Meningkatnya Kualitas/Kapasitas SDM APIP	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan	3	Level
	Meningkatnya Penegakan Integritas Aparatur Pemerintah	Persentase capaian survey internal, eksternal dan expert SPI	100	Persen
		Persentase Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	100	Persen

Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp. 273.431.400
		Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.	Rp. 166.570.890
	Jumlah		Rp. 440.002.290

Tabel 2.9.
**Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon IV Kasubag Umum, Evaluasi
dan Pelaporan Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	B
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum	Tingkat kepuasan pelayanan APIP	%	85
3	Meningkatnya Kenyamanan dalam Aktivitas kinerja	Tingkat kepuasan pelayanan APIP	%	85
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan	Persentase Pembayaran jasa Adminitrasi keuangan	%	100
5	Tersedianya pengadaan Barang /aset siap pakai	Pengadaan barang/aset siap pakai	%	100
6	Meningkatnya Pemakaian Aset daerah Siap pakai	Peralatan/aset yang siap Pakai	%	90

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.073.772.720
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 151.800.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 35.000.000
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.858.000
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 105.288300
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 19.687.400
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 21.850.000
8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan kousutasi SKPD	Rp 261.602.000

9	Pengadaan Mebel	Rp	18.333.000
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	139.760.900
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	96.408.000
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Rp	4.151.200
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Rp	16.400.000
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	84.446.000
15	Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp	25.000.000
16	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp	121.445.000

Rincian Belanja Inspektorat ditetapkan dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Rencana Belanja Inspektorat Daerah Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Ket
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.117.802.520	6.213.170.600	
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.260.572.720	5.047.363.820	
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121.445.000	116,485.000	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.285.700	621.992.040	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	158.093.900	153.431.900	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.559.200	105.953.440	
1.6	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	125.846.000	149.196.400	
2	Penyelenggaraan Pengawasan	650.038.000	915.461.000	
2.1	Penyelenggaraan pengawasan internal	544.606.000	733.529.000	

2.1	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	105.432.000	181.932.000	
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	245.932.200	495.932.200	
3.1	Pendampingan dan asistensi	245.932.200	495.932.200	
	Jumlah Anggaran	7.073.772.720	7.624.563.800	

2.3. Rencana Anggaran PD

A. Target Belanja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2023 didukung dalam APBDP dengan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 7.693.563.800,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 152.550.000,- yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar RP. 7.693.563.800,- pada akhir tahun 2023 Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.4.975.692.089 atau 101.05%, Realisasi Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.514.128.004 atau 99,00% dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 152.550.000 atau 99% Secara keseluruhan pada akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.7.642.370.093 atau 100,27%. Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.11.
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian Program dan Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Output /Keluara
	Belanja Pegawai	5.000.563.820	4.975.692.089	101%	
	Belanja Barang dan Jasa	2.539.568.080	2.514.128.004	99%	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.431.900	152.550.000	99%	

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.748.000	18.051.650	96.29	
	Kegiatan Administrasi				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.871.563.820	4.922.742.089	101 %	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	142.800.000	142.250.000	99. %	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	30.000.000	26.500.000	88%	
	Kegiatan Administrasi				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	116.485.000	112.883.870	96%	
	Kegiatan Administrasi Umum				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.450.000	6.387.250	99%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	184.064.000	181.119.550	98 %	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.195.440	27.563.340	97 %	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.140.000	21.927.500	99 %	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	381.132.000	381.132.456	100%	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.098.900	134.300.000	99 %	
	Pengadaan Mebel	18.333.000	18.250.000	99 %	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				

	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.051.040	87.464.668	90 %	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.902.400	8.774.250	98%	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.907.000	116.825.000	99 %	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat	7.300.000	4.314.500	56 %	
2	Program Penyelenggaraan				
	Kegiatan Pengawasan Internal				
	Pengawasan Keuangan	246.575.000	246.550.000	99 %	
	Reviu Laporan Kinerja	224.550.000	224.550.000	100%	
	Pengawasan Desa	162.998.000	162.255.000	99 %	
	Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	99.406.000	99.388.400	99 %	
	Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	39.432.000	39.298.000	99%	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	142.500.000	142.500.000	100%	
	Kegiatan Pendampingan dan				
	Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	110.818.900	109.901.475	99 %	

	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi dan Pencegahan Pemberantasan Korupsi	208.172.200	206.466.400	99 %	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	176.941.100	175.975.150	99%	

B. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.

Untuk mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan sasaran strategis maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12.

Alokasi Anggaran Persasaran Strategis

N O	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Anggaran (Rp.)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	633.355.000
			Meningkatnya Nilai Hasil Evaluasi dokumen PMPRB OPD	Indeks RB	109.901.475
2	Meningkatkan Kepatuhan Tata Kelola Keuangan sesuai S.A.P	Opini Laporan Keuangan BPK	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan internal dan eksternal	Pesentase jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut yang di TL hasil temuan Pengawasan Internal dan Eksternal	487.652.800
3	Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal	Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan SDM APIP	Indeks Maturitas SPIP	175.975.150



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 maupun Renja Perubahan Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas

capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

NO	CAPAIAN KINERJA	WARNA	INTERPRESTASI
1.	> 100 %		Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100 %		Sesuai Target
3.	< 100 %		Tidak Mencapai Target

Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan 2021-2026 maupun Renja Perubahan Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan menentukan kinerja utama dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel : 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	B	BB	100%
2.	Meningkatkan Kepatuhan Tata Kelola Keuangan PD sesuai SAP	Opini atas Laporan Keuangan BPK	Predikat	WTP	WTP	100%
3.	Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal	Indeks Maturitas SPIP	Level	3	3.012	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa sasaran program dan kegiatan Tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik Sehingga tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tercapai.

Tabel : 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
dalam sasaran program dan kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring Kinerja /pengawasan Internal Perangkat daerah	Nilai	B	BB	100%
2.	Meningkatkan Kepatuhan Tata Kelola Keuangan PD sesuai SAP	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan internal dan eksternal	Terlaksananya Monev tindak lanjut Hasil pemeriksaan BPK dan APIP, Meningkatnya Penyelesaian Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu	Predikat	WTP	WTP	100%
3.	Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan SDM APIP	Tersusunnya Regulasi Pembinaan dan Pengawasan, Terlaksananya Koordinasi, Monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi, SPIP, Saber pungli dan Gratifikasi	Level	3	3.012	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa sasaran program dan kegiatan menunjukkan hasil yang baik Sehingga tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tercapai.

Tabel : 3.4

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP B	BB	100%
2.	Meningkatnya Nilai Hasil Evaluasi dokumen PMPRB OPD	Indeks RB	3	100%
3.	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan internal dan eksternal	Pesentase jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut yang di TL hasil temuan Pengawasan Internal dan Eksternal	45 LHP	90%
4	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan SDM APIP	Indeks Maturitas SPIP level 3	Level 3	100%

Tabel : 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan Beberapa Tahun sebelumnya

NO	SASARAN PROGRAM	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP B	B	100	Nilai SAKIP B	BB	100	Nilai SAKIP BB	BB	100%
2	Meningkatnya Nilai Hasil Evaluasi dokumen PMPRB OPD	Indeks RB C	C (42,98)	100	Indeks RB C	C (47,24)	100	Indeks RB B	B(63,20)	100%
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan internal dan eksternal	50 LHP	45	90%	50 LHP	45 LHP	90%	60 LHP	50 LHP	83%
4	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan SDM APIP	Indeks Maturitas SPIP level 2	Level 1	100%	Indeks Maturitas SPIP level 2	Level 2	100 %	Indeks Maturitas SPIP level 3	Level 3 (3,981)	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan hasil yang baik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil kinerja Instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain Melaksanakan : Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah, Reviu Laporan Kinerja, Kegiatan pendampingan dan Asistensi dan penilaian Reformasi dan birokrasi.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan Analisis bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Evaluasi dan Analisis dilakukan supaya tingkat efektivitas antara tujuan dan hasil, manfaat dan dampak sesuai target. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

a. Sasaran Pertama

Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja PD

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja PD. Pencapaian Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja PD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran Pertama
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja PD

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN %	TAHUN 2022		CAPAIAN %	TAHUN 2023		CAPAIAN %
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	Nilai AKIP	nilai	B	B	100	B	BB	100	B	BB	100

Tabel di atas memperlihatkan pada Tahun 2023 capaian kinerja dengan nilai BB sebesar 100 % dengan katagori Sangat Baik (> 70- 80). Hal ini terlihat dengan meningkatnya efisiensi pengguna anggaran dalam pencapain target kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang dapat di andalkan sertas pengukurna kinerja telah di lakukan sampai ke level terendah.

Pencapaian kinerja Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja PD sesuai dengan target, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, seperti berikut:

Tabel 3.7

FAKTOR PENDUKUNG	PERMASALAHAN	SOLUSI/REKOMENDASI
1. SDM yang sudah bersertifikasi	1. Penugasan SDM nya Kurang Tepat Sasaran.	1. Penugasan sesuai dengan kualifikasi SDM.
2. Tersedianya Sarana Prasarana yang Memadai	2. Kurangnya Operator yang memadai	2. Peningkatan SDM

b. Sasaran Kedua

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD sesuai SAP

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD sesuai SAP. Pencapaian Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD sesuai SAP dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran Kedua
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD Sesuai SAP

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN %	TAHUN 2022		CAPAIAN %	TAHUN 2023		CAPAIAN %
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	Opini atas Laporan Keuangan BPK	nilai	WTP	WDP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100

Tabel di atas memperlihatkan pada Tahun 2023 capaian kinerja dengan nilai WTP sebesar 100 % dengan katagori Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini terlihat dengan Mendapatkan OPINI WTP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pencapaian kinerja Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja PD sesuai dengan target, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, seperti berikut:

Tabel 3.9

FAKTOR PENDUKUNG	PERMASALAHAN	SOLUSI/REKOMENDASI
1. Kualitas SDM 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi 3. Pengendalian Internal	1. Penugasan SDM nya Kurang Tepat Sasaran. 2. Kurangnya Diklat Peningkatan SDM 3. Belum Efektif	1. Penugasan sesuai dengan kualifikasi SDM. 2. Melaksanakan Diklat Sesuai Kebutuhan 3. Melaksnakan Pengendalian Internal Secara Berjenjang

c. Sasaran Ketiga

Meningkatnya Kualitas Sistem Pembinaan, Pengawasan dan SDM APIP.

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Sistem Pembinaan, Pengawasan dan SDM APIP. Pencapaian Meningkatnya Kualitas Sistem Pembinaan, Pengawasan dan SDM APIP dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga
Meningkatnya Kualitas Sistem Pembinaan, Pengawasan dan SDM APIP

N O	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN %	TAHUN 2022		CAPAIAN %	TAHUN 2023		CAPAIAN %
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP BPK	Nilai	3	3	100	3	3	100	3	3	100

Tabel di atas memperlihatkan pada Tahun 2023 capaian kinerja dengan nilai Maturitas SPIP Level 3 sebesar 100 %. Hal ini terlihat dengan telah dilaksanakannya Lima Aspek Pengendalian Yaitu SPIP Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Komunikasi dan Informasi yang Efektif.

Pencapaian kinerja Meningkatnya Kualitas Sistem Pembinaan, Pengawasan dan SDM APIP. sesuai dengan target, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, seperti berikut:

Tabel 3.11

FAKTOR PENDUKUNG	PERMASALAHAN	SOLUSI/REKOMENDASI
1. Anggaran Kegiatan	1. Terbatasnya Anggaran.	1. Menyesuaikan Anggaran Sesuai Kebutuhan .
2. Tim penilai	2. Kurang Kompeten SDM	2. Melaksanakan Diklat SPIP
3. Sarana Prasarana Pendukung	3. Belum Efektif	3. Peremejaan Fasilitas Pendukung.

➤ **Dilakukan Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan serta Alternative Solusi yang dilakukan**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

a) Identifikasi Permasalahan Akuntabilitas Kinerja PD

- 1) Penugasan SDM nya Kurang Tepat Sasaran.
- 2) Kurangnya Operator yang memadai

b) Identifikasi Permasalahan Kualitas Tata Kelola Keuangan

1. Kurang DIKLAT Peningkatan SDM Untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
2. Belum Efektif Pengendalian Internal

c) Identifikasi Sistem Pembinaan, Pengawasan dan SDM APIP

1. Terbatasnya Anggaran pada Kegiatan Tertentu
2. SDM Tim Penilai SPIP Kurang Kompeten
3. Belum Efektifnya Penggunaan Sarana dan Prasarana

Penugasan SDM yang Tepat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Menempatkan Operator atau tenaga teknis yang memadai di masa yang akan datang sehingga Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkat.

Peningkatan SDM Sangat Dibutuhkan Untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi supaya Pengendalian Internal dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk mencapai SPIP yang Optimal.

➤ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Inspektorat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Organisasi perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tujuan Utamanya adalah meningkatkan akuntabilitas transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

Inspektorat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Mempunyai Sumber daya dan Sarana Prasarana :

Sumber daya yang ada pada inspektorat daerah berjumlah 49 orang yang terdiri dari eselon II 1 orang, Eselon III 5 orang, Eselon IV 2 orang Fungsional Auditor 23 orang, Fungsional PPUPD 15 orang dan Fungsional Umum 3 orang.

Dengan beban kerja sebesar 206 (berdasarkan ABK) terdiri dari 29 OPD, 11 Kecamatan dan 142 pemerintahan desa membutuhkan SDM sebanyak 206 orang sehingga terdapat kekurangan SDM sebanyak 157 orang.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya yaitu Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, Pelaksanaan pengawasan

internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati, Penyusunan laporan hasil pengawasan, Pelaksanaan administrasi Inspektorat, Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Inspektorat Daerah memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana secara efisien dengan cara antara lain Membuat Standar Oprasional Prosedur.

3.3 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan total nilai keseluruhan adalah Rp. **7.693.563.800,-** (*Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*), realisasi anggaran sebesar Rp. **7.642.370.093,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **100,27%**, hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja, tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Pagu Anggaran Inspektorat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2023

URAIAN	PAGU	REALISASI (RP)	SISA ANGGA RAN (RP)	CAPAI AN (%)
Belanja Tidak Langsung	7.693.563.800,-			
) Belanja Pegawai	5.000.563.8200,-			
) Belanja Barang & Jasa	2.539.568.080,-			
) Belanja Modal	153.431.9000,-			
Jumlah Belanja	7.693.563.800,-	7.624.563.800,-		100,27

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Pencapaian Pagu Dan Realisasi Anggaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Berdasarkan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2023

NO	MISI	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	CAPA IAN (%)
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Sejahtera dan Berdaya Saing	6.709.102.800,-		
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	915.461.000,-		
JUMLAH		7.624.563.800 ,-	7.642.370. 093,-	100,2 7

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2023. Adapun untuk pencapaian sasaran dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel : 3.14
Pencapaian Pagu Dan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Sasaran Program Kegiatan
Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	CAPA IAN (%)	EFISIENSI ANGGARA N (RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota				
	Perencanaan, Penganggaran dan EValuasi Kinerja perangkat daerah	18.748.000	18.052.650	96.29	696.350

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.044.363.820	5.091.492.089	100.93	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.485.000	112.883.871	96.91	3.601.129
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	621.981.440	618.129.640	99.38	3.851.800
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeirntah Daerah	153.431.900	152.550.000	99.43	881.900
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.953.440	96.238.918	90.83	9.714.522
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	149.207.000	146.139.500	97.94	3.067.500
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	733.529.000	732.743.400	99.89	785.600
	Penyelenggaran Pengawasan dengan tujuan tertentu	181.932.000	181.798.000	99.93	134.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				
	Pendampingan dan Asistensi	495.932.200	492.343.025	99.28	3.589.175
	JUMLAH	7.698.563.800,-	7.642.370.093,-	95,05	26.321.976,-

3.4 Inovasi Perangkat Daerah

Mendukung Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah dan pelayanan public secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalu peningkatan pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah, Inspektorat daerah kabupaten Bengkulu selatan melakukan inovasi daerah antara lain :

1. Penunjukan Inovasi Ruang Klinik dana BOSP
2. Penerapan Aplikasi e- AWU (Aplikasi WBS dan UPG) dalam rangka pengendalian gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel : 3.15

Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	NAMA INOVASI	KEGIATAN	DAMPAK
1	Ruang Klinik dana BOSP	1. Pemantau system penyaluran Dana BOSP. 2. Monitoring Rutin secara Berakala Kesiapan sekolah Penerima dan Pelaksana Dana BOSP.	Penyaluran Dana BOSP dapat dimonitor mulai dari penyaluran, pelaksanaan dan pertanggung jawabanya
2	Aplikasi e- AWU	Kegiatan Menerima Pengaduan ASN dan Masyarakat	Mempermudah pengaduan bagi masyarakat



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat kabupaten Bengkulu Selatan selama satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

Pemyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 1 tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ini melaporkan pertanggungjawaban atas segala upaya telah dilaksanakan dalam pencapaian Visi dan Misi yang sudah disepakati bersama.

Pada tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pencapaian sasaran IKU bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah berusaha dengan maksimal untuk mencapai target kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4.2 REKOMENDASI

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi di rumuskan saran-saran sebagai berikut:

- a. Dibutuhkan komitmen seluruh Karyawan Inspektorat daerah Bengkulu Selatan akan pentingnya penerapan SAKIP agar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil guna;
- b. Menempatkan menugaskan SDM yang Tepat pada setiap Penugasan.

- c. Menambah Jumlah Operator yang memadai
- d. Mengadakan DIKLAT Peningkatan SDM Untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
- e. Mengefektifkan Pengendalian Internal
- f. Menyediakan Anggaran Sesuai Kebutuhan
- g. Menambah Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan

Manna, 2024

Inspektorat Daerah

Kab. Bengkulu Selatan

Inspektur,



HAMDAN, S.Sos

Nip. 197201011993031007

